



Judul : Tidak Ada Dinas Khusus: Duh, Ekonomi Kreatif Minim Akses Modal
Tanggal : Sabtu, 19 Maret 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Tidak Ada Dinas Khusus

Duh, Ekonomi Kreatif Minim Akses Modal

ANGGOTA Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira menyoroti ekonomi kreatif yang minim pembiayaan. Banyak pelaku ekonomi kreatif ini tidak tersentuh karena lemahnya koordinasi antara masing-masing institusi baik pusat hingga daerah.

“Apalagi kita tahu kaitan dengan ekonomi kreatif ini tidak ada induknya. Dalam arti tidak ada dinas khusus yang menangani ekonomi kreatif ini,” kata Andreas dalam rapat kerja Komisi X bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (16/3).

Sementara ekonomi kreatif ini, lanjutnya, banyak berhimpitan dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Mesi banyak mendapat pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek), para pelaku ekonomi kreatif ini terkendala akses permodalan. “Dan di kita itu sangat minim. Artinya Kemenparekraf ini sangat terbatas. Bantuan permodalan ini sangat terbatas,” katanya.

Dia usul, persoalan pembiayaan ini dibicarakan secara lintas kementerian termasuk dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Sehingga ekonomi kreatif ini bisa tumbuh di daerah. Supaya terjadi sinergi pengembangan ekonomi kreatif terutama di daerah.

“Kalau di atas tidak ada masalah. Tapi begitu sampai di daerah ini ego masing-masing apalagi ini kan otonomi daerah dan dinas-dinas ini tidak bisa terkait satu sama lain kalau tidak ada perintah dari atas,” katanya.

Wakil Ketua Komisi X Agustina Wilujeng Pramestuti menambahkan, masih ada masukan untuk mitra kerja yang tidak dapat ditindaklanjuti. Program-program tersebut tidak dapat terlaksana karena minimnya dana atau anggaran yang digelontorkan pemerintah kepada Kemenparekraf.

Dia berpesan agar program-program yang digagas terutama terkait rencana penetapan lokasi pariwisata bisa terintegrasi.

“Seperti pengadaan tanah itu saya berpesan ini dirembuk dengan masyarakat dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Agustina tidak menginginkan penetapan lokasi wisata oleh pemerintah maupun investor malah berpotensi mematikan kehidupan ekonomi masyarakat. Harus ada peran masyarakat di situ sebagai upaya penyelamatan kegiatan ekonomi mereka. “Supaya investor tidak merasa rugi, masyarakat juga secara ekonomi terlindungi,” katanya. ■ KAL